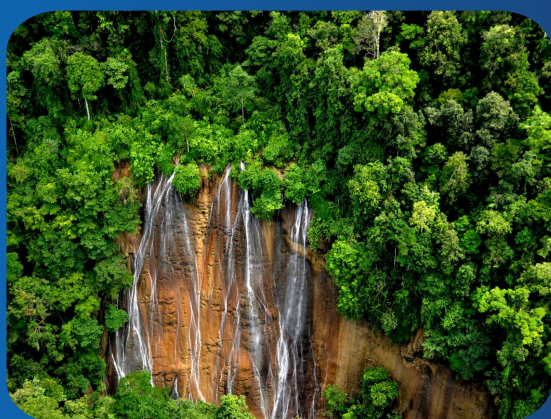




**PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA 2025**

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH



**20
24**



GUBERNUR MALUKU UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan menaikkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga laporan yang disampaikan ini dapat diterima dan dipahami serta memaknai sebagai perubahan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperbaiki capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Tim Penyusun dan pihak terkait lainnya.

Berbagai dinamika sosial, ekonomi dan regulasi nasional yang berkembang laju di pusat dan daerah semakin memberi penguatan otonomisasi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Hal ini menuntut kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan dari setiap sasaran dan indikator yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi secara terukur melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan Visi, Misi, Sasaran serta Indikator Kinerja yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi yang ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini diharapkan tidak sebatas sajian data dan analisis capaian kinerjanya tapi menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sofifi 7 Februari 2025

Pj.GUBERNUR MALUKU UTARA

The image shows a circular official stamp of the Governor of North Maluku. The stamp features a central emblem of a Garuda bird, a traditional symbol of Indonesia, with the words "GUBERNUR" at the top and "MALUKU UTARA" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SAMSUDDIN ABDUL KADIR



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
I N S P E K T O R A T

Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sofifi, 26 Maret 2025

**INSPEKTUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

Nirwan M.T. Ali, SH., MM., CGCAE
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19710625 199803 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan penyampaian informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, demikian pula dalam upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), maka sebagai implementasi Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan 5 Sasaran Strategis dengan ringkasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	6,19	6,03	102,58

Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Wilayah Ketimpangan	0,722	1,043	55,54
Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,71	72,88	93,86
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	33,10	70,7	213,60
	Indeks Rasio Gini	0,278	0,310	100
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	60,63	56,75	96,44

Untuk pengukuran tahun 2024 yang mana dari 5 indikator kinerja sasaran tersebut setelah diukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Jumlah indikator dengan kategori **sangat baik** sejumlah 4 indikator kinerja.
2. Jumlah indkator dengan kategori **baik** sejumlah 0 indikator kinerja.
3. Jumlah indikator dengan kategori **cukup baik** sejumlah 1 indikator kinerja.
4. Jumlah indikator dengan kategori **kurang baik** sejumlah 0 indikator kinerja.
5. Jumlah indikator yang **tidak dapat diukur** adalah sejumlah 0 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dari 5 indikator kinerja sasaran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara umum masuk kategori “**BAIK**”. Adapun capaian kinerja tersebut diperoleh berkat upaya kerja keras dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara beserta dukungan masyarakat Maluku Utara dan stakeholder dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan di tahun 2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Sambutan Gubernur

Ikhtisar Eksekutif

BAB I

Hal:1-13

Pendahuluan

BAB II

Hal:14-26

Perencanaan Kinerja

BAB III

Hal:27-79

Akuntabilitas Kinerja

BAB IV

Hal:80-81

Penutup

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

1. Kondisi Fisik Daerah

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur serta terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 770 km dan dari Barat ke Timur sepanjang 60 km. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km², terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km² atau 30,92 persen. Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, terdapat perubahan luas wilayah laut dan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya sesuai hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi melalui persetujuan substantif Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Provinsi Maluku Utara secara Administratif memiliki batas wilayah, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 kota, 116 Kecamatan dan 1.176 Desa/Kelurahan, sedangkan Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Kota yang dijabarkan pada Tabel berikut ini.

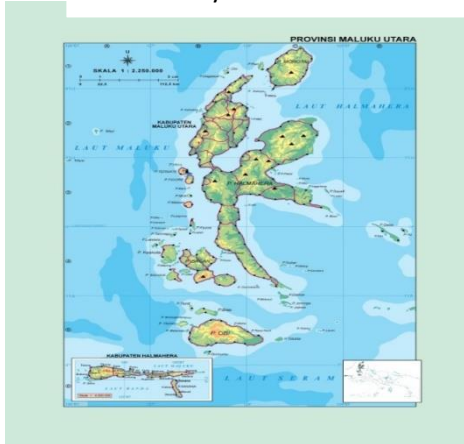
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah Darat (Km ²)	Luas Wilayah Laut (Km ²)	Jumlah Luas (Km ²)
1	Provinsi Maluku Utara	Sofifi	32.004,57	113.796,53	145.801,10
2	Halmahera Selatan	Labuha	8.148,90	31.484,40	39.633,30
3	Halmahera Utara	Tobelo	3.896,90	19.536,02	23.432,92
4	Halmahera Barat	Jailolo	1.704,20	11.623,42	13.327,62
5	Halmahera Timur	Maba	6.571,37	7.695,82	14.267,19
6	Halmahera Tengah	Weda	2.653,76	6.104,65	8.758,41
7	Pulau Morotai	Daruba	2.476,00	13.170,01	15.646,01
8	Kepulauan Sula	Sanana	1.791,84	6.647,17	8.439,01
9	Pulau Taliabu	Bobong	3.004,48	7.697,29	10.701,77

10	Kota Tidore Kepulauan	Soa Sio	1.645,73	4.293,20	5.938,93
11	Kota Ternate	Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
Total			32.004,57	113.796,53	145.801,10

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka, 2024

Gambar 1 : Wilayah Provinsi Maluku Utara



Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan pada tabel 1.1 tersebut diatas jika dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten/ Kota, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni seluas 39.633,30 km². Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kota Ternate dengan luas wilayah hanya mencapai 5.655,94 km²

2. Batas Wilayah

Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Samudera Pasifik
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Laut Halmahera
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Laut Maluku
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Laut Seram

Berdasarkan luas wilayah tersebut, memungkinkan Provinsi yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 tersebut memiliki kondisi geografis yang strategis terhadap peluang investasi bisnis. Karena daerah ini diprediksi memiliki sumber daya alam melimpah di sektor perikanan dan kelautan dan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku Utara, selain sektor lainnya seperti Pertanian sub sektor Peternakan dan Perkebunan, sektor Perdagangan dan sektor Pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi.



Selain itu, Provinsi Maluku Utara terletak pada posisi perbatasan negara Indonesia dengan perairan Internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan pada perairan yang relatif tidak jauh dengan perairan Negara Filipina.

Pada posisi yang merupakan perbatasan laut yang demikian, maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus mendapat perhatian serius karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Berbagai risiko penyusupan atau infiltrasi, illegal fishing, bajak laut dan sebagainya mengancam Provinsi Maluku Utara karena posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional. Di bagian sisi barat wilayah Provinsi Maluku Utara, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia.

Dengan adanya ALKI III ini, maka wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Adanya pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Ternate serta sebaran sejumlah Pos Angkatan Laut (POSAL) dan fasilitas Angkatan Udara di Morotai, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan yang secara militer mendapat pengawalan ketat. Dengan demikian, maka jelas bahwa ditinjau dari segi geopolitik maupun keberadaan berbagai fasilitas Militer, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Andalan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional RI.



3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RT/RW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, meliputi:

- a) Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b) Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- c) Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- d) Kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dimaksud terdiri dari:

- 1) Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan Pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi:
 - a. Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
 - b. Pengembangan kegiatan Pemerintahan tingkat Provinsi di Kota Sofifi;
 - c. Pengembangan kegiatan Pemerintahan tingkat Kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
 - d. Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai Ibu Kota Provinsi;
 - e. Peningkatan bandar udara di Ternate;
 - f. Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
 - g. Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan Sofifi;
 - h. Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan petikemas di Ternate;



- i. Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan Pulau Halmahera;
 - j. Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;
 - k. Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 - l. Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
 - m. Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
 - n. Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.
- 2) Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
- a. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 - b. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perikanan;
 - d. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- 3) Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:
- a. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
 - b. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
 - c. Pengembangan pusat pemerintahan;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
 - f. Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.



- 4) Kawasan Halmahera Selatan meliputi kecamatan Gane Barat dan kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
 - a. Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 - b. Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 - c. Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- 5) Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang diarahkan pada:
 - a. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - b. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
 - c. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- 6) Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
 - a. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - b. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 - c. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 - d. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
 - e. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);

- f. Pengembangan pariwisata.
- 7) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera, Halmahera Tengah dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan pariwisata dan Hankam.
 - 8) Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Halmahera diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
 - 9) Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel oleh PT. Aneka Tambang.
 - 10) Kawasan pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.

Gambar 3 : Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara



Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

3.1. Pengembangan Kawasan Maluku Utara

Untuk mengembangkan suatu daerah dengan bentuk wilayah Kepulauan diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama mewujudkan keseimbangan wilayah daratan dan perairan (laut) antara daerah dan pulau terutama dalam hal tingkat pertumbuhannya.

Selain untuk memenuhi tuntutan keadilan sosial ini memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perdagangan antar daerah (pulau) yang berimbang. Hal ini mendorong terwujudnya "spesialisasi daerah", yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar bagi masing-masing daerah untuk berkembang dan bertumbuh lebih maju. Kedua, terwujudnya keseimbangan antar daerah (pulau) berarti pula bahwa kesatuan ekonomi dari wilayah daratan kepulauan dan perairan menjadi lebih kokoh.



3.2. Identifikasi Sektor Unggulan Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara

Pengembangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara mengacu pada sektor yang memiliki kriteria unggulan. Penentuan potensi unggulan menggunakan analisis SLQ dan DLQ yang menghasilkan komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut (Dokumen MP3EI Provinsi Maluku Utara):

1. Halmahera Barat memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, terutama tanaman pangan yaitu ubi jalar, ubi kayu dan jagung. Komoditas unggulan untuk subsektor perkebunan meliputi kakao, kelapa dan cengkeh.
2. Halmahera Selatan memiliki komoditas unggulan di sektor industri pengolahan dan perdagangan hotel-restoran. subsektor yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan tanpa migas berupa industri pengolahan kayu dan industri pengolahan hasil perikanan tuna dan cakalang. Untuk subsektor perdagangan hotel-restoran yang unggul terutama restoran.
3. Halmahera Tengah memiliki sektor unggulan di sektor pertanian, bangunan dan jasa. Subsektor yang menjadi unggulan subsektor perkebunan adalah kakao, kopi dan cengkeh.
4. Halmahera Timur memiliki subsektor unggulan di sektor pertambangan. Komoditas unggulannya terutama adalah nikel.
5. Halmahera Utara memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian dan perdagangan hotel-restoran. Komoditas unggulan yang dihasilkan terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan masing-masing meliputi ubi kayu, jagung, kedelai, kelapa, kakao, lada dan pala.
6. Kepulauan Sula memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, perdagangan dan listrik. Komoditas subsektor perikanan yang menjadi unggulan adalah ikan tuna dan cakalang. Sedangkan komoditas unggulan subsektor perkebunan meliputi kopra dan cengkeh.
7. Morotai memiliki sektor unggulan terutama pertanian dan perdagangan, dengan subsektor unggulan perikanan dan restoran. Komoditas unggulan di subsektor perikanan, yaitu

- jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, teri, kembung) dan ikan demersal (kakap, baronang).
8. Ternate memiliki komoditas unggulan di sektor bangunan dan pengangkutan-komunikasi. Subsektor yang menjadi unggulan adalah bangunan dan angkutan jalan raya.
 9. Tidore memiliki komoditas unggulan di sektor perdagangan hotel-restoran. Produk subsektor yang menjadi unggulannya adalah produk perdagangan besar dan eceran.

B. KONDISI UMUM PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor atas 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Seperti pada gambar dibawah ini.



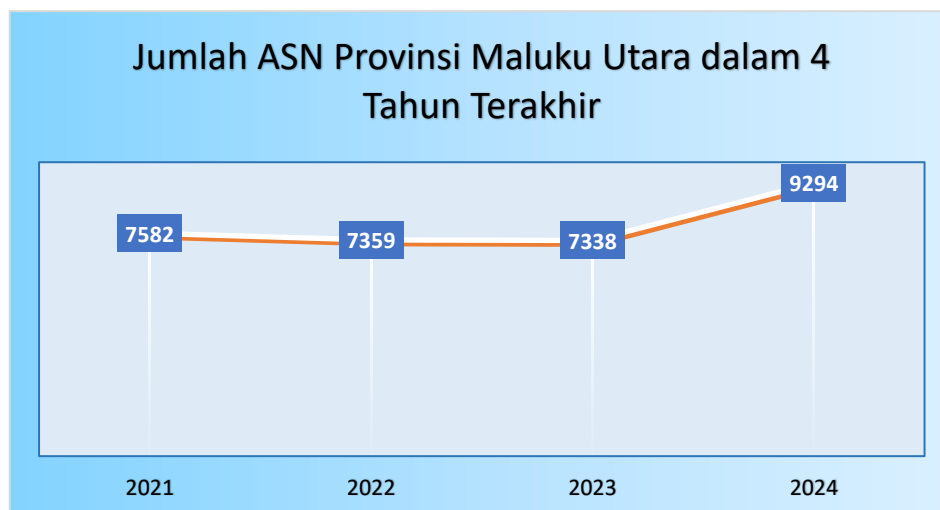
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki tujuan pokok yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia demi

menciptakan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara yang lebih baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat banyak persoalan-persoalan baik dari sisi tata kelola Pemerintahan, tata kelola keuangan dan persoalan eksternal Pemerintahan yang berimplikasi pada kualitas pelayanan.

1. SUMBER DAYA APARATUR

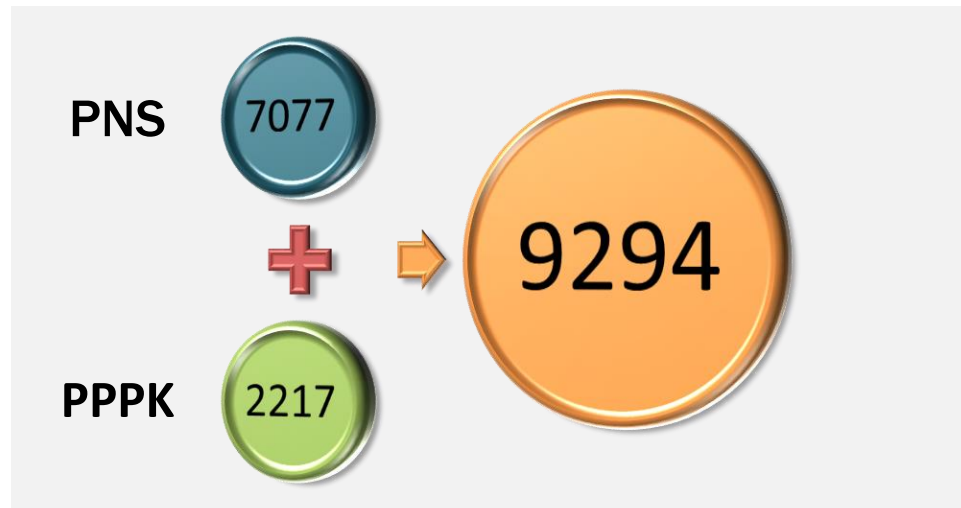
A. Komposisi ASN 4 (Empat) Tahun Terakhir

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas dan fungsi Pemerintahan agar terciptanya sistem pemerintahan yang *good governance* maka di perlukan adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terkait dengan penyajian Kepegawaian Provinsi Maluku Utara, ASN Provinsi Maluku Utara dibagi dalam beberapa kategori diantaranya: ASN berdasarkan pangkat/golongan, ASN berdasarkan jabatan dan ASN berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tergambar pada Grafik dibawah ini :



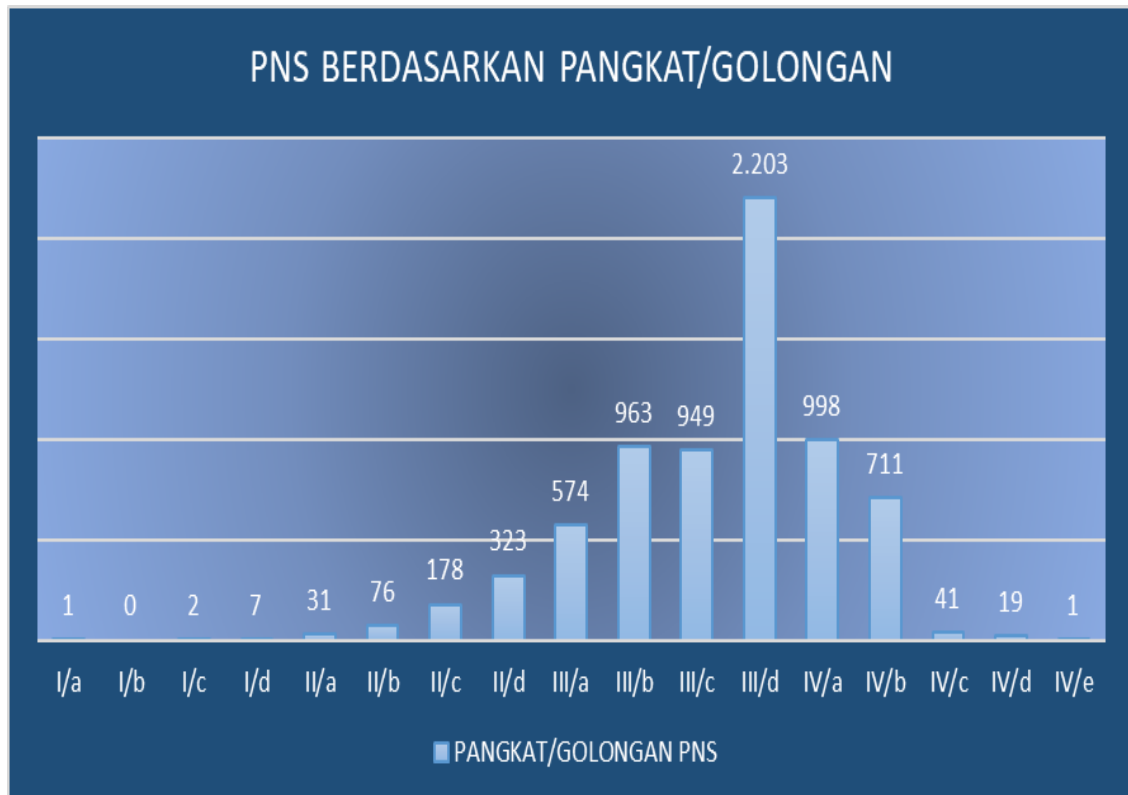
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2024

B. Komposisi ASN Provinsi Maluku Utara Tahun 2024



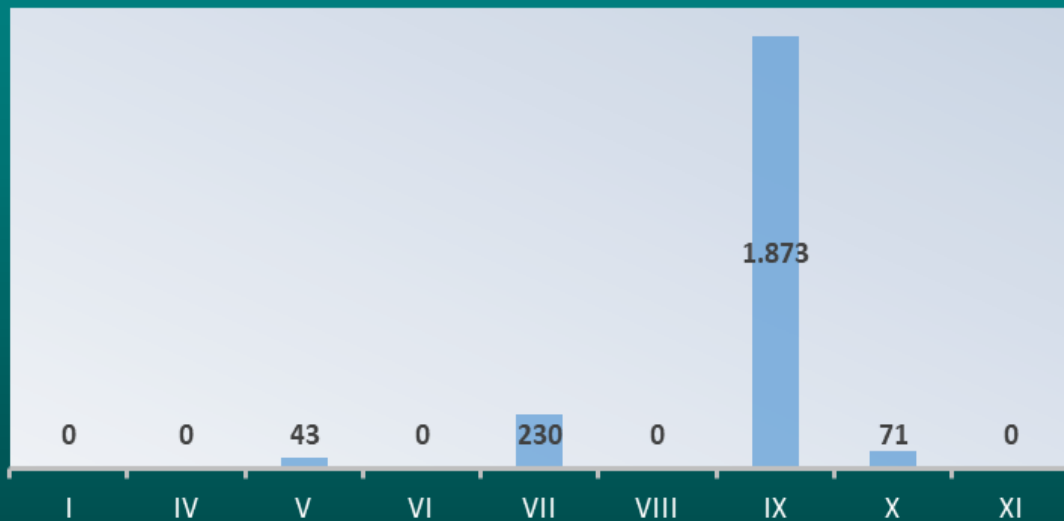
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2024

C. Sebaran PNS dan PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan

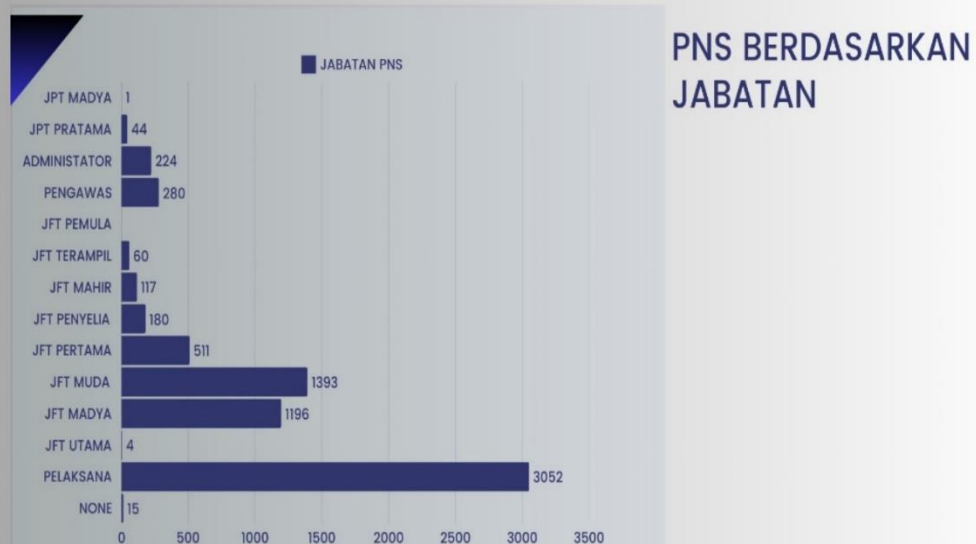


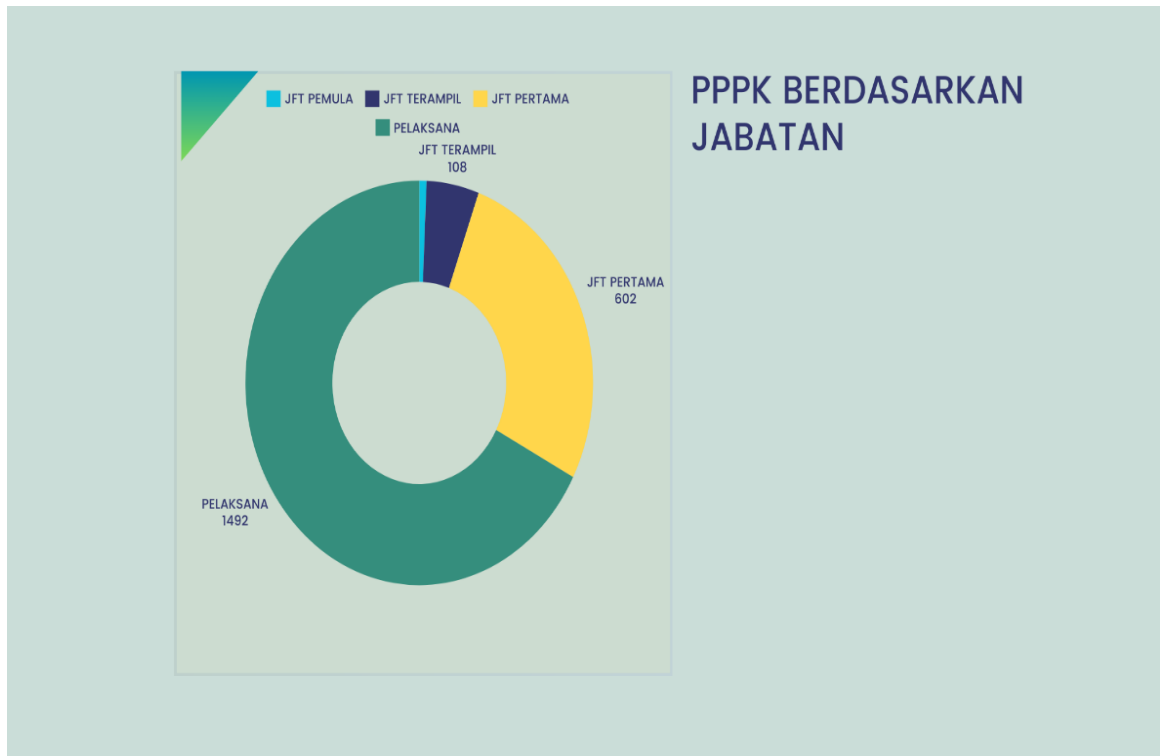
PPPK BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

■ PANGKAT/GOLONGAN P3K



D. Komposisi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan





Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2024

E. Komposisi PNS dan PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BKD Provinsi Maluku Utara 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024. Pada tahun akhir RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota yang memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, serta memerintahkan Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Berikut disajikan secara ringkas Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2020-2024 , Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2026 serta keterkaitan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2024.

A. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

1. VISI

Dengan menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Damai, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera yang berorientasi Sumber Daya laut



dan kepulauan” serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dinamika dan isu-isu strategis yang ada, maka visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA 2024”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **SEHAT** dan **CERDAS** berbudaya (sumber daya manusianya), **MAJU** (infrastruktur dan wilayahnya), **AGAMIS** DAN **HARMONIS** (masyarakatnya), **TUMBUH EKONOMINYA** (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **REFORMIS** DAN **ADIL** (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.



Maluku Utara Maju, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayahkepulauan.

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai danharmonis.

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masadepan.

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka perlu ada kerangka yang jelas terkait tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai sehingga pelaksanaan urusan Pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan dan administrasi pemerintahan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan berjalan terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020-2024.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja RPJMD 2020-2024 pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel .1.2

SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan/Sasaran)	TARGET 2024
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif		Indeks Pembangunan Manusia	70,11
				Indeks Pembangunan Gender	90,14
			Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	6,19
		Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,86
2	Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau		Indeks Pembangunan Infrastruktur*	77,86
		Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah		Indeks Perkembangan Wilayah	60,39
			Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,722
3	Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,71



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan/Sasaran)	TARGET 2024
4	Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan		Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	11,59
				Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	26,67
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,57
			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	33,10
				Indeks Rasio Gini	0,278
		Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,90
				Indeks Risiko Bencana	142,27
5	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	60,04
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	60,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	persen	6,19
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0,722
3	Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,71
4	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja,	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	Nilai	33,10
		Indeks Rasio Gini	Nilai	0,278



	meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan			
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,63

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja RPD 2025-2026 pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2
TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA RPD 2025-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator	Satuan	Target Capaian	
					2025	2026
1	Menyiapkan fondasi transformasi sosial dan ekonomi melalui penguatan SDM dan peningkatan produktifitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		IPM	Nilai	71,12	71,52
			IPG	Nilai	-	-
			Tingkat Kemiskinan	Angka	2,43-2,93	2,31 – 2,78
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-	-
		Terwujudnya SDM yang unggul dan berdaya saing melalui layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Angka	71,4	71,7
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	12	11
			Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	70,5875	70,965
			Rata-rata lama sekolah usia di atas 15 (tahun)	Angka	9,73	9,82
			Harapan lama sekolah (tahun)	Angka	13,848	13,956
		Terwujudnya SDM yang ketahanan budaya, setara dan inklusif	Indeks ketimpangan gender	Nilai	0,507	0,4996
			Indeks Pembangunan kebudayaan	Nilai	53,16	54,14
		Terwujudnya Transormasi ekonomi melalui peningkatan pendapatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja	PDRB Perkapita (Rp.Juta)	Nilai	89,71-89,52	89,71-89,52
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	3,1-3,8	3,0 – 3,8
		Terwujudnya pemerataan pembangunan perkotaan hingga	Rasio Gini	Nilai	0,294	0,29
			persentase desa mandiri	Persen	0,2	0,25



No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator	Satuan	Target Capaian	
					2025	2026
		perdesaan				
2	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	Persen	55,26	58,42
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	82,42	82,5
			Indeks resiko bencana	-	-	-
		Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	82,42	82,5
			indeks resiko bencana	Nilai	147,84 – 146,66	147,84 – 146,66
3	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, melayani dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	57,9	57,9
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, melayani dan inovatif	SAKIP	Predikat	B	B
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67	67,77
			LPPD	Nilai	2,83	3
			SPBE	Nilai	2,6	2,7

B. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA****GUBERNUR MALUKU UTARA****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Samsuddin Abdul Kadir.,M.Si**

Jabatan : **Pj.Gubernur Maluku Utara**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sofifi, 20 Mei 2024

Pj.GUBERNUR MALUKU UTARA



Samsuddin Abdul Kadir

Tabel .2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2024

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,19
Sasaran Strategis 2			
Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0,722
Sasaran Strategis 3			
Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	78,71
Sasaran Strategis 4			
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.1	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	Nilai	33,10
4.2	Indeks Rasio Gini	Nilai	0,278
Sasaran Strategis 5			
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60,63

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan capaian target Kinerja pada Tahun 2024 tersebut telah menyiapkan APBD Tahun 2024 dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp 3.557.059.080.000** bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.



Tabel.2.5
Rincian Pagu Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu (Milyar Rupiah)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.142.958.253.098,00
2	Dinas Kesehatan	146.809.895.468,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	23.561.300.539,00
4	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	7.925.000.051,00
5	RSUD Dr. H. Chasan Boesorie Ternate	129.848.938.716,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	795.991.882.036,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	148.260.758.771,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.834.424.923,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	15.830.399.970,00
10	Dinas Sosial	24.727.422.600,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.003.006.920,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.615.833.400,00
10	Dinas Pangan	14.711.137.615,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.989.733.450,00
12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.330.075.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.021.030.750,00
14	Dinas Perhubungan	13.826.260.700,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	8.884.536.400,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.719.307.798,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.035.415.811,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.773.945.606,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	395.359.751,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.783.884.881,00
	Dinas Pariwisata	16.109.459.200,00
21	Dinas Pertanian	75.525.722.429,00
22	Dinas Kehutanan	51.769.594.741,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.276.428.365,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.902.872.145,00
25	Inspektorat Daerah	35.682.282.764,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.587.944.331,00
27	Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah	460.079.571.161,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	12.874.882.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.501.352.936,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.510.929.480,00



32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.242.701.350,00
33	Sekretariat Daerah	86.323.381.000,00
34	Sekretariat DPRD	118.149.644.650,00
35	Badan Penghubung	11.964.284.580,00
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.740.196.159,00
37	Badan Pendapatan Daerah	62.100.319.900,00
TOTAL		3.557.059.080.000,00

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara berada pada nilai 64,02 dengan tingkat akuntabilitas kinerja **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK”, yaitu Implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja adapun rincian penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

KOMPONEN		BOBOT	NILAI
			2024
A	PERENCANAAN KINERJA	30	25,13
B	PENGUKURAN KINERJA	30	15,54
C	PELAPORAN KINERJA	15	10,14
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	13,21
NILAI HASIL EVALUASI		100	64,03
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			B

Dari hasil evaluasi kinerja diatas berikut ditampilkan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2024



Tabel 2.3
Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP 2024

No	REKOMENDASI LHE 2023/REKOMENDASI HASIL ASISTENSI INTENSIF 2024	TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PROGRES PENYELESAIAN (IN PROGRESS/SELESAI)	LINK BUKTI DUKUNG (JIKA ADA)
1	Pada PD memastikan kembali keselarasan pada perencanaan kinerja pada Renstra dengan PP, khususnya dalam penetapan sasaran strategis sehingga pencapaian kondisi kinerja menjadi lebih jelas dan konsisten serta meningkatkan kepatuhan penyampaian dokumen kinerja secara keseluruhan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-
2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-



	mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses rewiu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah					
3	Mengunggah dokumen rencana kerja dan rencana aksi setiap tahunnya pada aplikasi ESR.menpan.go.id	Telah dilakukan penguplotan dokumen perencanaan pemda dan PD kedalam aplikasi esakip rewiu	Triwulan 1 s.d triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-
4	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-



	strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur					
5	Memastikan kembali program dan kegiatan yang dimiliki untuk lebih berfokus pada pencapaian kinerja sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki;	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-
6	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	-



	kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Provinsi Maluku Utara;					
7	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level PD dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	
8	Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP Pemda dan PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	



9	Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penyusunan Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih dalam bentuk draf pergub	Triwulan 3	Inspektorat	Selesai	
10	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi efektif yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD serta memonitoring secara berkala atas tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	triwulan 3	Biro organisasi,bappeda dan inspektorat	Selesai	

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah.

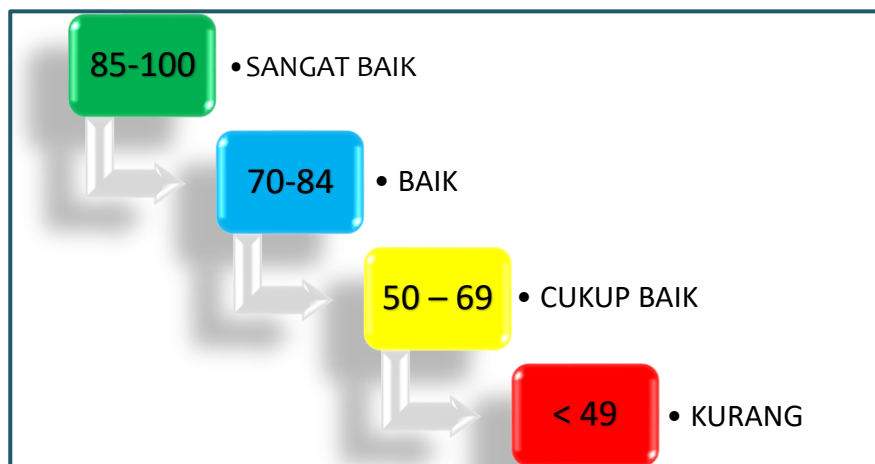
Dengan mengacu pada aturan tersebut, metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari

setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :



Dengan menggunakan rumus pengukuran capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin tinggi realisasi kinerja semakin tinggi capaian kinerja organisasi dan sebaliknya.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin rendah realisasi kinerja semakin tinggi capaian kerja organisasi dan sebaliknya

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tidak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Provinsi Maluku Utara tahun 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- **Dokumen Perjanjian Kinerja** Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Januari 2024.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 maka analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA

Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun sumber
daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2024**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,97	6,38	6,37	6,46	6,03	6,5-7,5	6,19	6,03	102,58	Sangat Baik	6,19

1. Indikator Tingkat Kemiskinan

Realisasi kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 6,97% pada tahun 2020 menjadi 6,03% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Capaian kinerja dari Sasaran terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2024 adalah 102,58 persen dengan predikat **“SANGAT BAIK”** faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja karena adanya sinergi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan aspek penting dalam program penanggulangan kemiskinan.

Gambar 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan
Tahun 2023 dan 2024



Realisasi Kinerja Sasaran Misi Pertama terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif untuk Indikator Tingkat Kemiskinan sudah memenuhi/melampaui target akhir RPJMDP 2020-2024.

Gambar 2.3
Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan terhadap Target Akhir RPJMDP 2020-2024



Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sudah berada di atas angka Nasional, begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi tiga tahun terakhir trend realisasi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 telah berada di atas angka Nasional.

Perbandingan Indikator Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dengan Capaian Nasional



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Pertama Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 5.3
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.093.323.203
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.606.212.800
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	328.428.600
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	214.010.650
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	201.490.400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	292.294.350,00



	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.101.800
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	229.020.300
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	255.444.700
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.635.422.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	9.093.323.203
DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.352.254.600
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.352.254.600
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.427.254.600
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	925.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	2.352.254.600
TOTAL KESELURUHAN	2 PROGRAM	11.445.577.803

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja dari Sasaran pada Misi Pertama melalui Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalankan 2 Program 2 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 11.445.577.803 (0,32%)** dari total APBD Tahun 2024.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator Tingkat Kemiskinan yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:



1. Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka menguatkan peran dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan juga aksi berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Selain faktor keberhasilan terdapat juga faktor penghambat dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama yang terdapat pada beberapa indikator diantaranya:

1. Masih tingginya tingkat kesenjangan yang dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Maluku Utara terutama di wilayah lingkaran tambang dimana menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di Tahun 2024 berada diangka 25,13%, Pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tidak terlepas dari sumbangan besar pertambangan Nikel di Maluku Utara. tiga Kabupaten penyumbang terbesar pertambangan Nikel di Maluku Utara adalah Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Ketiganya sama-sama menghasilkan Nikel, tetapi dua daerah terakhir masih berjibaku menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.
2. Porsi APBD yang di belanjakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara belum tepat sasaran dimana 26,25% anggaran dari total belanja di peruntukan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sedangkan untuk Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur hanya 12% dari total belanja.

MISI KEDUA

MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KONEKTIFITAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Mengakselerasi
Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah
Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:



Tabel 7.3
Capaian Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur,
Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0	0	0,303	1,308	1,043	0	0,722	1,043	55,54	Cukup Baik	0,722

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan ketimpangan wilayah selama periode 2020-2024 dengan realisasi indeks yang telah melebihi target yang ditetapkan dengan predikat capaian **"Cukup Baik"**, meskipun realisasinya melebihi target, predikat ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mengurangi ketimpangan wilayah masih perlu ditingkatkan, dan menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mencapai target yang lebih baik di masa yang akan datang.



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :



Tabel 8.3
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah
dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada
Misi Kedua

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	706.555.408.437
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	706.555.408.437
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	301.666.261.326
	Pembangunan Jalan	287.977.930.811
	Rekonstruksi Jalan	95.580.197.040
	Penggantian Jembatan	5.818.286.400
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	15.412.732.860
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.008.443.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.008.443.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.792.443.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	216.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	711.563.851.437
DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	700.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	700.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	77.234.000



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Komunikasi Publik	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	53.910.000
	Pelayanan Informasi Publik	68.856.000
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	500.000.000
	TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM 700.000.000
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.058.287.100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.058.287.100
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.558.287.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	500.000.100
	TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM 6.058.287.100
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.485.850.600
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	926.535.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	926.535.000,
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	139.624.200
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	139.624.200
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	221.952.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan	221.952.200



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.739.200
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.739.200
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.957.853.200
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	261.466.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	261.466.800
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	638.250
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	638.250



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Terintegrasi Secara Elektronik	
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	187.889.600
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	187.889.600
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	918.707.850
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	750.638.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,	168.069.600



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.589.150.700
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.299.750.100
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	289.400.600
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	4.443.703.800
TOTAL KESELURUHAN	4 PROGRAM	722.765.842.337

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 722.765.842.337 (20,32%)** dari total APBD Tahun 2024.

Faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku Utara:

1. Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan secara alami menghadapi tantangan dalam pembangunan yang merata. Lautan memisahkan wilayah-wilayah, meningkatkan biaya transportasi dan komunikasi, serta mempersulit integrasi ekonomi dan sosial.
2. Tidak semua wilayah di Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sama. Beberapa pulau mungkin miskin sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi, sementara yang lain kaya.
3. Kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek pemerataan atau kurang efektif dalam mengatasi tantangan



4. geografis dan sumber daya dapat memperparah ketimpangan
5. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan juga bervariasi antar wilayah. Daerah dengan kapasitas yang lebih rendah mungkin kesulitan untuk menarik investasi dan mengelola pembangunan secara efektif

Faktor historis dan sosial budaya juga dapat berperan dalam membentuk pola ketimpangan wilayah. Misalnya, sejarah pembangunan yang tidak merata di masa lalu atau perbedaan struktur sosial dan budaya antar wilayah.

Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara upaya menekan ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku Utara adalah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Maluku Utara, terutama infrastruktur transportasi (pelabuhan, bandara, kapal perintis), infrastruktur dasar (listrik, air bersih, telekomunikasi), dan infrastruktur pendukung ekonomi (pasar, irigasi, dll.). Setiap wilayah di Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi masing-masing wilayah.

MISI KETIGA

MEMBANGUN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, AMAN, DAMAI DAN HARMONIS

Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai Dan Harmonis, merupakan salah satu Misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 9.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Misi Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada satu sasaran yakni : Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan. Pencapaian kinerja pada sasaran tersebut tidak dapat diukur karena indikator sasarnya tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 dan hanya memuat indikator Tujuan dari Misi Ketiga:



Tabel 10.3
Capaian Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis,
Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,66	76,40	68,72	-	72,88	76,47	78,71	72,88	93,86	Sangat Baik	78,71



Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama di Tahun 2024 memiliki realisasi kinerja 72,88 dengan capaian kinerja sebesar 93,86 dengan Predikat **“SANGAT BAIK”** , begitu juga terlihat pada perbandingan realisasi kinerja antar tahun dan perbandingan capaian kinerja terhadap target RPJMDP 2020-2024 dimana terjadi Terjadi fluktuasi indeks kerukunan umat beragama dari 72,66 di tahun 2020 menjadi 72,88 di tahun 2024 sedangkan pada perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 adalah masih berada dibawah target RPJMDP, begitu juga jika dibandingkan dengan target Nasional ternyata nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Utara berada belum mencapai target Nasional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 11.3
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	101.368.182.900
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1.299.331.800
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.299.331.800
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100.068.851.100
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	90.015.333.845



	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	10.053.517.255
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	101.368.182.900
BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	27.146.852.810
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.146.852.810
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	26.737.408.210
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.047.500
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	408.397.100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.067.600
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1.067.600



	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.067.600
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	113.453.353.580
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	113.453.353.580
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.105.300
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.079.500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	405.037.700



	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	510.584.900
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	112.535.546.180
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	3 PROGRAM	140.601.273.990
TOTAL KESELURUHAN	4 PROGRAM	241.969.456.890

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 4 Program, 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 241.969.456.890 (6,80%)** dari total APBD Tahun 2024.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Maluku Utara memiliki misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai, dan harmonis. Misi ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama
2. Tokoh agama dan masyarakat di Maluku Utara memiliki peran



penting dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Mereka secara aktif terlibat dalam dialog antaragama, mediasi konflik, dan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan

3. Masyarakat Maluku Utara memiliki tradisi toleransi dan kerukunan yang kuat. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama
4. Pemerintah Daerah Maluku Utara juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang juga berkontribusi pada peningkatan nilai KUB di Maluku Utara, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama
- b. Efektivitas program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai KUB di Maluku Utara merupakan hasil dari upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat secara keseluruhan..



MISI KEEMPAT

MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS DENGAN ORIENTASI PADA NILAI TAMBAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara

Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 12.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (Juta)
		Indeks Gini Rasio

Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada sasaran yakni : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang



transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan.

Capaian kinerja Sasaran untuk Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di Tahun 2024, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

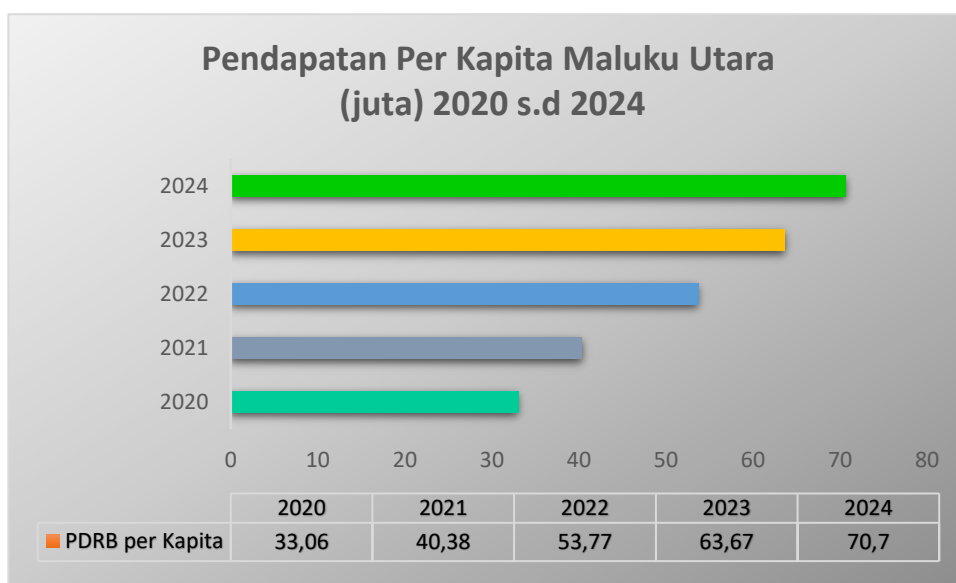


Tabel 13.3
Capaian Kinerja Sasaran Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (juta)	Nilai	33,06	40,38	53,77	63,67	70,7	-	33,10	70,7	213,60	Sangat Baik	33,10
			Indeks Gini Rasio	Nilai	0,290	0,278	0,309	0,300	0,310	0,377	0,278	0,310	100	Sangat Baik	0,278

1. Indikator Pendapatan per Kapita (Juta)

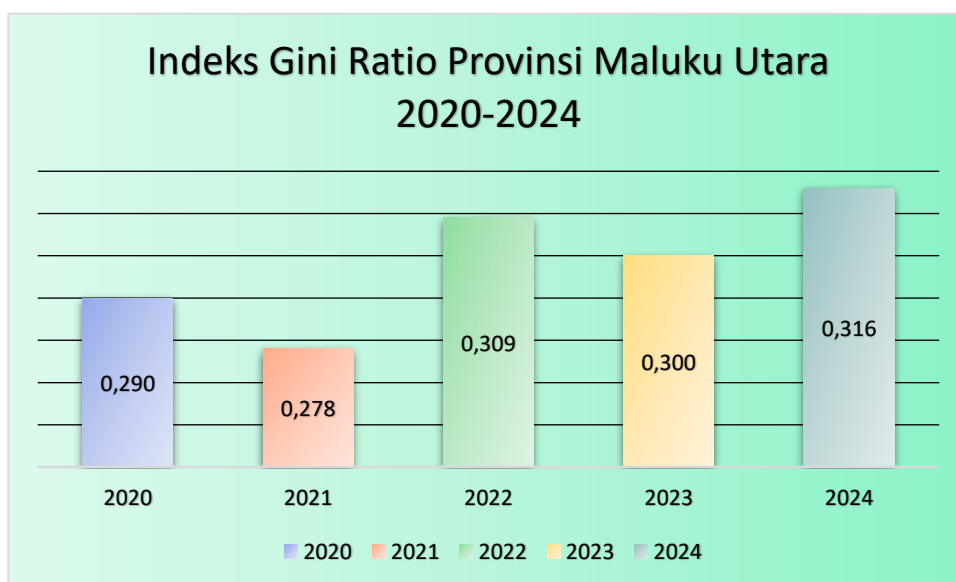
Realisasi Kinerja dari Sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan dengan Indikator Pendapatan per Kapita (juta) adalah 70,7 juta dengan capaian kinerja sebesar 213,60 persen dengan Predikat **“SANGAT BAIK”**. Dilihat dari data antar tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 realisasi Pendapatan per Kapita Provinsi Maluku Utara terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024, untuk perbandingan dengan target RPJMDP Realisasi pendapatan per kapita Maluku Utara selalu melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.



2. Indikator Indeks Gini Ratio

Realisasi Kinerja dari Sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan dengan Indikator Indeks Gini Rasio Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2024 berada

diangka 0,310 dengan capaian kinerja diangka 100 persen dengan predikat **“SANGAT BAIK”**. Dilihat dari data antar tahun realisasi Indeks Gini Ratio Provinsi Maluku Utara terjadi fluktuasi dalam periode 2020-2024 walaupun terjadi fluktuasi, Maluku Utara sering kali memiliki nilai Gini Ratio yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Indeks Gini Rasio Tahun 2024 berada diangka 0,316 angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023, sedangkan realisasi Indeks Gini Rasio Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target RPJMDP masih berada di atas Target RPJMDP.



Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :



Tabel 14.3
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.450.000.700
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	649.999.900
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	450.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	199.999.900
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	1.450.000.700
BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.028.967.100
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.028.967.100
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	387.670.200
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	944.609.750
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	250.961.800
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9.548.450.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	379.784.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	227.192.350
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	312.135.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	396.992.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	210.221.800
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	157.748.800
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	839.063.500,
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	374.137.900



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Retribusi Daerah	
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	14.028.967.100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.424.970.174
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	7.424.970.174
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	7.424.970.174
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	799.991.020
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	799.991.020,
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	799.991.020
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	8.224.961.194
DINAS KOPERASI DAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.651.674.270
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8.651.674.270
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8.651.674.270
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	8.651.674.270



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	567.543.600
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	567.543.600
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	26.000.000
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	195.542.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	195.841.600
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.160.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.663.638.000
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.663.638.000
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.213.638.000,
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	300.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	150.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	570.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	340.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	160.000.000



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	180.000.000
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	230.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	150.000.000
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	80.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	106.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	106.000.000
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	26.000.000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	80.000.000
	TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM 8.651.674.270
TOTAL KESELURUHAN		5 PROGRAM 39.262.784.864

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 39.262.784.864 (1,10%)** dari total APBD Tahun 2024.



Meningkatnya Pendapatan per Kapita Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Ekonomi Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri, terutama ekspor produk olahan nikel.

2. Kinerja Sektor Industri

Industri pengolahan, terutama yang terkait dengan sumber daya alam mineral, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas pertambangan dan penggalian juga memberikan kontribusi yang signifikan.

3. Peningkatan Produksi dan Konsumsi

Peningkatan penjualan listrik dan pertumbuhan sektor transportasi menunjukkan peningkatan aktivitas produksi, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi

4. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2024 didorong oleh kombinasi faktor-faktor tersebut, dengan sektor industri pengolahan dan pertambangan memainkan peran yang sangat penting.



Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka Gini Rasio Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

- Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Namun, pertumbuhan ini belum merata, dan manfaatnya belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Kesenjangan antara sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

2. Ketidakmerataan Akses terhadap Peluang Ekonomi

- Akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang berkualitas masih terbatas bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan
- Kurangnya akses terhadap modal dan sumber daya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif.

3. Ketidakmerataan Distribusi Pengeluaran

- Data BPS menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk di Maluku Utara
- Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275; naik dibanding dengan Gini Ratio Maret 2023 dan Gini Ratio September 2022 yang sama-sama sebesar 0,269
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi



pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,61 persen

4. Inflasi

- Inflasi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 3,57% (yoy), naik dibandingkan dengan bulan Februari 2024 dan lebih tinggi dari angka nasional sebesar 3,05%
- Kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, dapat berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperlebar ketimpangan.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan ini diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja
3. Memperkuat program-program perlindungan sosial
4. Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi UKM

Pengendalian Inflasi

MISI KELIMA

MEMANTAPKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN

Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 15.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah

Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 1 (satu) sasaran yakni : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif, dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk Tahun 2024.

Realisasi dan Capaian Kinerja untuk Indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 16.3
Capaian Kinerja Sasaran dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	205	24,44	33,11	56,75	58,47	-	60,63	58,47	96,44	Sangat Baik	60,63

Realisasi capaian kinerja pada Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 adalah 96,44% dengan predikat **“SANGAT BAIK**. Begitu juga bila dilihat dari perbandingan realisasi kinerja antar tahun nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya dari predikat Kurang Inovatif di Tahun 2020 meningkat menjadi Inovatif di Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan inovasi yang signifikan di Maluku Utara, walaupun demikian Indeks Inovasi Daerah belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMDP diangka 60,63 sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan didalam RPJMDP.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 17.3
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	934.522.800
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	492.327.350
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	492.327.350
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	442.195.450
	Sosialisasi dan Diseminasi	442.195.450



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Hasil-Hasil Kelitbangan	
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	934.522.800
TOTAL KESELURUHAN	1 PROGRAM	934.522.800

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 1 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 934.522.800 (0,03%)** dari total APBD Tahun 2024.

Kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kinerja Inovatif OPD

peran aktif Organisasi Perangkat Daerah dalam menciptakan inovasi, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Utara menunjukkan kinerja yang sangat inovatif. OPD seperti Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kesehatan, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinilai sangat inovatif.

2. Terbitnya Instruksi Gubernur

Instruksi Gubernur Maluku Utara Nomor 100.3.41/VI/2024 tentang Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi¹ menjadi pendorong utama. Instruksi ini memotivasi OPD untuk melaksanakan program secara progresif dan meningkatkan inovasi

3. Komitmen Pimpinan Daerah

Dukungan dan apresiasi dari pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong budaya inovasi.

4. Peningkatan dari tahun sebelumnya

Maluku utara mengalami peningkatan pada tahun 2023, dari peringkat 34 menjadi 12. Peningkatan ini bisa menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan lebih lanjut pada tahun 2024

Secara keseluruhan, peningkatan IID Maluku Utara merupakan hasil dari sinergi antara kinerja inovatif OPD, arahan dari pimpinan daerah, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jika dilihat dari alokasi anggaran per Misi, alokasi anggaran terbesar terdapat pada Misi Kedua, **Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah** yaitu sebesar 20,32 % dari total APBD tahun 2024. Sedangkan alokasi anggaran terkecil berada pada Misi Kelima **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan** sebesar 0,03% dari total APBD tahun 2024.

Alokasi APBD Tahun 2024 per Misi Gubernur





Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum tercapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih besar daripada yang ditargetkan dan juga lebih besar daripada realisasi capaian kinerjanya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja ini setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu bagi internal organisasi sebagai media untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan bagi masyarakat diharapkan sebagai sarana untuk menilai kualitas penyelenggara pemerintahan sebagai pihak penerima amanah.

Dokumen ini merupakan gambaran pencapaian target-target sasaran dari setiap Agenda, Kebijakan dan Program Pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, capaian indikator utama yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara nampak telah



menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada pencapaian tahun keempat RPJMD Provinsi Maluku Utara.

Pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memuat pencapaian kinerja tahun pelaporan (2024) dan juga membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun sebelumnya, yang muaranya mengarah pada target akhir pencapaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencapaian indikator kinerja, masih terdapat permasalahan yang sangat mendasar yakni masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati dalam RPJMD, hal ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) SKPD yang menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan RPJMD tahun 2020 -2024. Dengan kondisi yang demikian maka apa yang dilakukan oleh sebagian SKPD tidak terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Maluku Utara masih harus terus dilakukan demi pencapaian hasil dari Visi dan Misi Gubernur.

Lampiran :

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 BERDASARKAN MISI DAN SASARAN STRATEGIS

No	Misi/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Capaian				
			Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Dapat diukur
MISI.1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya							
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	1	1	-	-	-	-
MISI.2 : Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah							
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	1		-	1		-
Misi.3: Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis							
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	1	1	-	-	-	-
Misi.4: Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan							
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	2	2	-	-	-	
Misi.5: Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan							
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	1	1	-	-	-	-
TOTAL		6	4	0	1	0	0

